

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Arman, A. R., dan Pakir, A. H. K., 2011. The characteristic of Real Estate Assets Management Practise in the Malaysian Federal Government. *Journal of Corporate Real Estate*. Vol.13, No. 1, 16 – 35.
- Ciptono, W. S., 2013. *Manajemen Aset – Optimalisasi BMN: Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan*. UGM. Yogyakarta.
- Ciptono, W. S., 2012. Circulation Economics and Lean Programs: Best Practices of Professional Asset Management For Public Organizations. *Swara MEP FEB UGM*. Yogyakarta.
- Cooper, D.R., Schindler, P.S. 2014. *Bussiness Research Methods* 12th Edition. McGraw-Hill. United States.
- David, F. R., 2009. *Manajemen Strategis Konsep* Edisi ke-12 (Dono Sunardi, *Trans*). Jakarta, Salemba Empat. (*Original work* diterbitkan tahun 2001).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2016. Visi dan Misi DJKN. Tersedia di [http:// http://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/visi-misi](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/visi-misi), diakses pada 20 Maret 2016.
- Efrizon. 2011. Strategi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana. UGM, Yogyakarta.
- Habis, M. H., Trigunarsyah, B., dan Susilawati, C. 2011. The Application of Public Asset Management in Indonesia Local Government – A Case Study in South Sulawesi Province. *Journal of Corporate Real Estate*. Vol.13, No. 1, 36 – 47.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2006 atas Penyaluran. Penggunaan dan Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 atas Efektivitas Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi Periode 2008-2012.
- Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.99 Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2016 Pada DJKN selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Negara Transaksi Khusus (*audited*).
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

- Keputusan Menteri Keuangan nomor 85/KMK.06/ 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 85/KMK.01/2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.01/2008 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Serta Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat Serta Penugasan Kepada Unit-Unit Terkait di Lingkungan Departemen Keuangan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas/Prosedur Operasi Standar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinator Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dan Eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014–2025.
- Montanari, J. R., dan Bracker, J. S. 1986. The Strategic Management Process at the Public Planning Unit Level. *Strategic Management Journal*. Vol. 7, 251 – 265.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Quertani, M.Z., Parlikad, A.K., dan Mcfarlane, D. 2008. Towards An Approach to Select An Asset Information Management Strategy. *International Journal of Computer Sciences and Applications*. Vol. 5, No. 3b, Juni: 25 – 44.

- Rangkuti, F. 2006. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Samsudin. 2012. Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu (Studi Empiris Terhadap Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2006-2010). *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana. UGM, Yogyakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Buku Kedua Edisi Empat*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siregar, D.D. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Steiss, A. W., 2003. *Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations*. Marcel Dekker Inc. United States.
- Umar, H. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik Untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.